

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL (Studi di Pasar Langowan)

Oleh:
Refrenri D. Sumilat ¹

ABSTRAK

Keberadaan pasar tradisional sangat penting bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Namun pada kenyataannya masih banyak keberadaan pasar tradisional masih sangat memprihatinkan. Penelitian ini akan melihat bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan pasar tradisional di Kabupsten Minahasa khususnya di Pasar Langowan. Dengan menggunakan metode kualitatif, peran pemerintah akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:18), tentang pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dilihat dari bagaimana *Participaton*, *Transparency*, *Responsiveness*, dan *Consensus of orientation*. Temuan penelitian menggambarkan dari semua indicator peran pemerintah kabupaten Minahasa masih perlu berbagai perbaikan agar pengembangan pasar tradisional Langowan berjalan seperti yang diharapkan.

Kata Kunci: Peran; Pasar Tradisional

ABSTRACT

The existence of traditional markets is very important for the economic empowerment of the community at the village level. However, in reality there are many traditional markets that are still very poor. This research will look at the role of the government in the development of traditional markets in Minahasa Regency, especially in Langowan Market. By using qualitative methods, the role of government will be studied using the approach proposed by Mardiasmo (2004: 18), regarding good governance as seen from how Participation, Transparency, Responsiveness, and Consensus of orientation. The research findings illustrate that all indicators of the role of the Minahasa district government still need various improvements so that the development of the Langowan traditional market runs as expected.

Keywords: Role; Traditional market

PENDAHULUAN

Pasar tradisional merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi besar terhadap pilar perekonomian di Indonesia. Ketahanan dan kelangsungan hidup pasar tradisional akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sehingga pemerintah harus tetap menjaga keberadaan pasar tradisional. Pasar tradisional mempunyai peran strategis dalam hal penyerapan tenaga kerja. Menurut data BPS (2012) menunjukkan bahwa "sektor ritel mampu menyerap 23,4 juta tenaga kerja atau sekitar 21,3% dari total tenaga kerja Indonesia. Dengan jumlah tersebut, penyerapan tenaga kerja di sektor ritel menempati urutan kedua setelah sektor pertanian yang menampung 39,3 juta tenaga kerja atau sekitar 35,8% dari total tenaga kerja Indonesia.

Khusus sektor ritel di Pasar tradisional sendiri, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mencatat bahwa terdapat 13.450 pasar tradisional di seluruh Indonesia dengan 12,6 juta pedagang yang melayani kebutuhan sehari-hari dari hampir 60% populasi Indonesia. Sebagian besar masyarakat masih bergantung dengan keberadaan pasar tradisional. Terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, masih menjadikan pasar tradisional sebagai pilihan untuk melakukan aktivitas jual beli. Seperti dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat dan kebutuhan masyarakat

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

konsumen yang semakin kompleks keberadaan pasar tradisional kini mengalami ancaman yang begitu besar. Salah satu pesaing pasar tradisional yang menjadi ancaman bagi pasar tradisional yaitu adanya pasar modern. Pasar tradisional terus mengalami penurunan di tengah pertumbuhan pasar modern yang semakin pesat. Menurut data Nielsen (2013) “perbandingan pertumbuhan pasar tradisional terhadap pasar modern cukup drastis yaitu pasar tradisional tumbuh melambat negatif 8,1% sementara pasar modern tumbuh 31,4%”. Berdasarkan kenyataan ini maka pasar tradisional telah mengalami ancaman serius kedepannya. Keberadaan pasar tradisional telah ada sejak puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu. Sebagian besar pasar tradisional yang ada di Indonesia merupakan saksi sejarah dan memiliki nilai budaya. Saat ini keberadaan pasar tradisional telah mendapat tekanan dari pertumbuhan pasar modern yang semakin pesat dan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup pasar tradisional. Peran perekonomian berskala kecil seperti pedagang, pelaku usaha kecil menengah tidak dapat bertahan dalam persaingan. Peran pasar tradisional sebagai pilar perekonomian nasional tidak akan mampu mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Kondisi pasar tradisional sebagian besar kotor dan kurangnyaman untuk berbelanja dimanfaatkan oleh para investor untuk membuat suatu konsep tempat belanja baru yang lebih baik dan nyaman. Pasar modern muncul sebagai konsep baru yang menawarkan alternatif tempat belanja selain di pasar tradisional. Dengan konsep dan fasilitas yang lebih baik, pasar modern akhirnya mampu menggeser pasar tradisional. Tempat belanja yang lebih bersih, pilihan barang yang menarik, fasilitas lengkap, keamanan lebih terjamin merupakan serangkaian kelebihan yang ditawarkan kepada pengunjung pasar modern dengan memanjakan dan memudahkan mereka pada saat berbelanja di pasar modern. Persaingan di antara keduanya pun tidak terhindari. Minimnya aturan zonasi dari pembangunan pasar modern, maka pasar tradisional yang berada di kota-kota besar terkena imbasnya.

Persaingan head to head akibat menjamurnya pasar modern membawa dampak buruk terhadap keberadaan pasar tradisional. Salah satu dampak nyata dari kehadiran pasar modern di tengah-tengah pasar tradisional adalah turunnya pendapatan terhadappedagang pasar setiap harinya. Emiliana (2011) “Pasar tradisional kalah bersaing dengan pasar modern disebabkan masyarakat lebih memilih berbelanja di toko modern. Hal ini dapat dilihat dari toko-toko modern yang lebih nyaman dengan pelayanan mandiri dan modern dibandingkan dengan pasar tradisional.

Toko-toko modern pada umumnya menyediakan barang yang telah siap di konsumsi, dengan sarana dan prasarana yang memadai serta menyediakan jenis barang yang disukai masyarakat termasuk kebutuhan hidup sehari-hari”. Beberapa kebijakan pemerintah telah dikeluarkan untuk menata pengelolaan perpasaran, baik pasar modern maupun pasar tradisional. Implementasi kebijakan ini menuntut komitmen lebih besar agar dapat dilaksanakan secara konsisten. Merespon keresahan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pasar modern dan pusat perbelanjaan. Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai antara lain pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan. Memberikan pedoman bagi penyelenggaraan ritel tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern.

Pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen. Untuk menegaskan Perpres nomor 112 tahun 2007, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Permendag No. 53 Tahun 2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Melihat fenomena yang terjadi, bahwa kebersihan di pasar Langowan mulai di abaikan oleh pemerintah setempat, sehingga banyak sampah yang tertumpuk dan menimbulkan bau busuk di sekitaran pasar Langowan yang ada. Berikut juga infrastruktur yang mulai di abaikan sehingga membuat masyarakat yang mengunjungi pasar tersebut merasa kurang nyaman akan fasilitas yang ada. Hal ini di sebabkan juga karena kesadaran masyarakat yang kurang baik, berupa tidak menjaga pasar yang ada dan tidak memperhatikan kebersihan pasar.

Hal ini juga sebenarnya menjadi tugas penting dari pemerintah yang ada, agar supaya masyarakat akan kebersihan dan kondisi pasar, dan juga pemerintah harus memperhatikan fasilitas yang ada, agar supaya pasar-pasar tradisional bisa tertata dengan rapih dan masyarakat bisa nyaman, ketika di kunjungi oleh masyarakat yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep tentang Peran

Menurut Biddle dalam Suhardono (1994), berpendapat bahwa “konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur social”. Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa peran merupakan perilaku individu maupun organisasi dalam menjalankan posisi pada suatu unit dari struktur sosial. Melalui posisi yang dimiliki oleh pelaku baik individu maupun kelompok inilah peranannya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian Menurut Soekanto (2002) peran dibagi menjadi tiga yaitu, peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tanggung jawab dan lainnya). Didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. Dikutip oleh Soerjono Soekanto dari buku *“Role, Personality and Social Structure”* karya Levinson, peranan dapat mencakup tiga hal berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Melekatnya peran pada individu dalam kondisi sebuah masyarakat kadang menimbulkan ketidaksesuaian yang diakibatkan tidak dijalankannya peran tersebut oleh individu yang bersangkutan. Inilah oleh Soekanto disebut dengan *role distance*. Keterpisahan antara individu dengan perannya kadang ditimbulkan dengan ketidakmampuan individu dalam melaksanakan peran yang diberikan oleh masyarakat. Cenderung menyembunyikan diri dan akhirnya peran yang dibebankan tidak berjalan atau berjalan dengan tidak sempurna. Setiap individu yang menjalankan peran cenderung tidak sendiri dalam melaksanakan peran sosialnya. Soekanto menyebut bahwa ada lingkaran sosial (*Social Circle*) yaitu tempat dimana seseorang mendapatkan dan melaksanakan peran sosialnya. Peranan tentunya mengaitkan banyak pihak yang terkait pada peran yang dilaksanakan tergantung dari besar tidaknya peran yang diberikan. Pemerintah setempat serta institusi terkait lainnya tentunya memiliki peran penting dan bagian yang berbeda-beda dalam melaksanakan peran.

B. Pemerintah

Tinjauan mengenai pemerintah, Labolo (2011) menjelaskan “sebagai representasi rakyat, pemerintah merupakan entitas yang dipandang paling berdaulat karena tidak semua organisasi yang memiliki kesamaan struktur dan fungsi sebagaimana organisasi pemerintah dapat disebut entitas pemerintah yang berdaulat”. Pemerintah sebagai badan atau yang mengurus pemerintahan dalam suatu negara.

Menurut Mardiasmo (2004 : 18), pemerintahan yang baik (*good governance*) meliputi :

1. *Participaton*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung

maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif.

2. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
3. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders.
4. *Consensus of orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
5. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan strategi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Pemerintah lahir dari hasil perjanjian atau kontrak social yang disepakati bersama sebagaimana teori kontrak social J.J. Rousseau. Manji (2010), Adanya kesepakatan yang kemudian dikenal dengan sebutan kontrak sosial (social contract) tersebut kemudian diberikan kekuasaan legal dengan mekanisme beragam seperti yang kita kenal sekarang semisal pemilihan umum yang selanjutnya melahirkan kekuasaan dan institusi pemerintahan. Menurut Ndraha yang dikutip oleh Erliana (2014) mengemukakan bahwa "pemerintahan adalah gejala sosial, yang terjadi dalam konteks hubungan antar warga masyarakat secara individual maupun secara berkelompok". Sebagaimana oleh Rasyid (2011), Pemerintah adalah sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Peran pemerintah berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintah itu sendiri. Ryaas Rasyid mengemukakan tugas-tugas pokok pemerintahan:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Singkatnya tugas-tugas pokok tersebut diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Davey (1998) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain pertama, sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan. Ketiga, fungsi pembangunanyaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Kemudian Menurut Ndraha (2001), “fungsi pemerintahan terdapat ada dua macam fungsi, yaitu Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk fungsi pemberdayaan, sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan”.

Dengan demikian, begitu luas tugas dan fungsi pemerintah, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggungjawab yang sangat besar. Untuk mengembangkan tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah sebagaimana dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Melalui kewenangan otonomi yang dimiliki Pemerintah daerah kota Makassar memiliki peraturan daerah nomor 15 tahun 2009 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern. Mengapa perlu untuk melindungi dan memberdayakan pasar khususnya pasar tradisional atau juga dikenal sebagai pasar rakyat. Karena di dalam pasar tersebut yang banyak terlibat adalah para pelaku usaha kecil menengah atau pedagang-pedagang dalam skala kecil. Banyak masyarakat menggantungkan penghidupannya dalam pasar tradisional. Pemerintah daerah atau kota sebagaimana dalam pasal 12 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memiliki urusan wajib yang meliputi perlindungan masyarakat, koperasi, usaha kecil, menengah. Secara tidak langsung terhadap perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional. Pemerintah Kabupaten berperan dalam pelaksanaan perlindungan pasar tradisional melalui satuan kerja perangkat dinas yaitu, Dinas Perdagangan.

C. Pasar Tradisional

Pasar adalah tempat dimana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli, Pasar didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu: penjual, pembeli dan barang atau jasa yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan, pertemuan antara penjual dan pembeli menimbulkan transaksi jual-beli (Majid, 1988). Pasar memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Indonesia selain sebagai muara dari produk-produk rakyat, pasar juga berfungsi sebagai tempat untuk bekerja yang sangat berarti bagi masyarakat. Saat ini pasar dikenal dengan adanya pasar tradisional dan pasar modern. Keberadaan pasar tradisional sangat besar manfaatnya bagi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan berkala atau kebutuhan sandang dan pangan juga sebagai sarana penunjang kemajuan perekonomian Negara. Di pasar tradisional terdapat banyak jenis komoditas yang diperjual-belikan biasanya adalah barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti sayuran, sembako, pakaian, dan barang kebutuhan sehari-hari lainnya.

Dikotomi antara pasar tradisional dan pasar modern sesungguhnya tidak hanya bersumber dari arsitektur bangunan atau manajemen pengelolaannya, melainkan bersumber dari pemaknaan tentang konsepsi pasar sebagai tempat berlangsungnya transaksi ekonomi. Konsep tentang pasar dapat dipahami dari berbagai perspektif, seperti perspektif ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Dalam perspektif ekonomi, konsep tentang pasar (dalam pengertian luas, sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran) terbentuk sebagai salah satu implikasi dari proses perubahan masyarakat menuju masyarakat kapitalis. Boeke (1910) merupakan salah satu ahli ekonomi yang mencoba menerangkan fenomena terbentuknya pasar dalam kerangka pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat prakapitalistik dengan masyarakat kapitalistik. Menurutnya, “perbedaan yang paling mendasar antara masyarakat prakapitalistik dengan masyarakat kapitalistik terletak dalam hal orientasi kegiatan ekonominya. Masyarakat dalam tingkatan prakapitalistik berupaya untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang diperolehnya, sedangkan masyarakat dalam tingkatan kapitalistik tinggi berupaya untuk mendapatkan laba maksimum”. Sastradipoera (2006), “Perbedaan orientasi ekonomi tersebut melahirkan nilai-nilai sosial dan budaya yang membentuk pemahaman terhadap keberadaan pasar dalam kedua kategori masyarakat tersebut. Dalam

masyarakat kapitalistik, individu secara otonom menentukan keputusan bebas.

Dalam masyarakat seperti itu, pasar merupakan kolektivitas keputusan bebas antara produsen dan konsumen". Jika keputusan produsen ditentukan oleh biaya alternatif, harapan laba, dan harapan harga pasar, maka keputusan konsumen ditentukan oleh daya beli, pendapatan minus tabungan, harga dan harapan harga komoditas, serta faktor individual seperti minat, kebutuhan, dan sebagainya. Dalam masyarakat prakapitalistik, sebaliknya, kolektivisme menentukan keputusan individual.

Pasar dalam masyarakat seperti itu merupakan pertemuan sosial, ekonomi, dan kultural. Jika keputusan produsen lebih ditentukan oleh harapan untuk mempertahankan posisi pendapatan yang telah dicapai, maka keputusan konsumen lebih dekat pada nilai kolektif yang dapat diraihnya. Nilai kolektivitas menjadi pembeda dalam pemahaman tentang konsepsi pasar di kalangan masyarakat prakapitalistik dan masyarakat kapitalistik. Bagi masyarakat prakapitalistik yang ciri-cirinya tampak dalam kelompok masyarakat yang masih berpatokan pada kolektivitas, kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar (dalam arti tempat bertemunya penjual dan pembeli) masih sangat diwarnai oleh nuansa kultural yang menekankan pentingnya tatap muka, hubungan personal antara penjual dan pembeli (yang ditandai oleh loyalitas „langganan“), serta kedekatan hubungan sosial (yang ditandai konsep „tawar-menawar harga“ dalam membeli barang atau konsep „berhutang“).

Karakteristik semacam ini pada kenyataannya tidak hanya ditemukan dalam masyarakat perdesaan sebagaimana ditekankan Boeke, tapi juga dalam masyarakat perkotaan, yang bermukim di kota-kota besar di Indonesia. Kondisi semacam inilah yang kemudian memunculkan dualisme sosial, yang tampak dalam bentuk pertentangan antara sistem sosial yang berasal dari luar masyarakat dengan sistem sosial pribumi yang hidup dan bertahan di wilayah yang sama. Secara sosiologis dan kultural, makna filosofis sebuah pasar tidak hanya merupakan arena jual beli barang atau jasa, namun merupakan tempat pertemuan warga untuk saling interaksi sosial atau melakukan diskusi informal atas permasalahan kota.

Pemaknaan ini merefleksikan fungsi pasar yang lebih luas, namun selama ini kurang tergarap pengelolannya dalam berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pasar, seperti kebijakan perdagangan, tata ruang, dan perizinan lebih banyak berorientasi pada dimensi ekonomi dari konsep pasar. Pengabaian terhadap fungsi sosial-kultural pasar inilah yang kemudian melahirkan bentuk-bentuk pasar modern yang bernuansa kapitalistik, yang lebih menonjolkan kenyamanan fisik bangunan, kemewahan, kemudahan, dan kelengkapan fasilitas namun menampilkan sisi lain yang individualistis, „dingin“, dan anonim. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam lingkup sosial masyarakat. Bukan sekedar terjadinya proses jual beli yang dipahami dari segi ekonomis belaka, namun terdapat nilai kolektivitas (kebersamaan) yang terwujud dalam interaksi sosial masyarakat dari berbagai kalangan. Terdapat kedekatan emosional yang ditandai dengan proses tawar-menawar, langganan, bahkan mengutang.

Hal ini menandakan adanya keterikatan personal dan kepercayaan yang terbangun antara satu sama lain. Sedangkan Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern. Poesoro, (2007) “dalam menjaga keberadaan pasar tradisional sebagai akibat dari hadirnya pasar modern, diperlukan pendekatan yang terpadu antara regulasi yang melindungi pasar tradisional, dukungan perbaikan infrastruktur, dan modal pedagang pasar tradisional”. Penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

1. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, dan menengah, pasar modern, dan toko modern.
2. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
3. Menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan.
4. Menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik-turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar.
5. Kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan,

- dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami.
6. Kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushollah dan fasilitas lainnya.
 7. Ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar.
 8. Perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Strauss dan Cobin (dalam Tresiana, 2013:14) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara pengukuran. Adapun fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana peran pemerintah kabupaten Minahasa khususnya peran yang dilakukan oleh dinas perdagangan Kabupaten Minahasa dalam pengembangan pasar tradisional Langowan. Adapun peran pemerintah akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004 : 18), tentang pemerintahan yang baik (*good governance*), yang meliputi:

1. *Participaton*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif.
2. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
3. *Respowiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders.
4. *Consensus of orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
5. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan strategi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh diolah dengan tahapan melakukan reduksi data, melakukan display data, baru kemudian menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian yang mengkaji peran pemerintah berdasarkan beberapa aspek yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004), menggambarkan:

1. *Participation*. Dimana penulis akan melihat ketelibatan masyarakat dalam suatu tatanan pemerintahan, terlebih khusus pada peran pemerintah dalam pengembangan pasar Tradisional di Langowan. Tentunya dalam pengembangan pasar Tradisional Langowan ini, perlu adanya peran dari masyarakat yang ada, baik dari pedagang ataupun dari pengunjung pasar ini, karena pemerintah juga dalam pengembangan pasar ini perlu sumbangsi pemikiran dari masyarakat agar supaya ada inovasi untuk pengembangan pasar ini. Namun nyatanya yang terjadi di lapangan, yaitu belum terciptanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga proses pengembangan pasar Tradisional ini belum berjalan dengan baik. Akibatnya sarana dan prasarana pasar Langowan masih jauh dari harapan, belum lagi masalah persampahan yang tidak bisa di kelola dengan baik sehingga menimbulkan bau yang tidak enak untuk di cium, hal ini tentunya sangat mengganggu pengunjung bahkan pedagang yang ada. Kalau saja komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat berjalan dengan baik, tentunya masalah – masalah seperti ini bisa dibicarakan dengan baik dan tentunya dapat menemukan jalan keluar. Hal ini yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah, yaitu peran aktif dari masyarakat untuk bisa mengembangkan pasar tradisional yang ada di Langowan. Karena keberhasilan dari suatu pemerintahan tentunya

harus ada partisipasi yang lebih dari masyarakat, baik dari pengambilan keputusan, tindakan, maupun kebijakan. Karena sejatinya ketika masyarakat punya partisipasi lebih kepada pemerintah dalam melakukan tindakan itu juga bisa mensejahterakan rakyatnya. Dalam hal ini juga pemerintah harus berperan aktif pada masyarakat untuk bisa mengajak dan menyadarkan masyarakat yang ada, untuk bisa sama-sama mengembangkan pasar ini. Yang harus dilakukan pemerintah tentunya melaksanakan pembinaan untuk masyarakat, memberikan tindakan yang nyata (apa yang di perlukan masyarakat) agar supaya pemerintah yang ada, bisa di percaya oleh rakyatnya.

2. *Transparency*. Transparansi di bangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Tujuan dari hal ini adalah untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan public dimana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi public yang membutuhkan. Terkait hal ini transparansi yang dibutuhkan yaitu untuk bisa mengetahui hal apa saja yang menjadi tugas pemerintah dalam pengembangan pasar tradisional Langowan ini, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Sesuai hasil penelitian yang di dapati bahwa pemerintah harus melakukan penyusunan program kegiatan di bidang pasar tujuannya untuk mengetahui secara rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar tujuan, kewajiban, dan sasaran pengembangan pekerjaan yang di capai. Melihat hal itu tentunya pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar agar supaya bisa mengembangkan pasar tradisional, namun nyatanya program yang tekah di susun oleh pemerintah hanya sebatas program saja dan tidak berjalan dengan baik, buktinya saja bahwa pemerintah akan memberikan fasilitas bagi para pedagang yang ada, namun ternyata masih banyak pedagang yang tidak mendapat tempat untuk berjualan sehingga di Pasar Langowan ini banyak pedagang liar yang sudah memakai jalan untuk para pengunjung. Ada juga salah satu bentuk kegiatan tersebut dengan melakukan sosialisasi tentang pengembangan pasar tapi hal tersebut masih jauh dari harapan, karena sampai saat ini juga pemerintah sendiri belum melakukan kegiatan tersebut. Melakukan survey ke lapangan untuk bisa mengetahui hal apa saja yang kurang pada pasar ini, kami juga melaksanakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar, penyelenggaraan kemitraan pedagang, pemeliharaan sarana dan prasarana pasar. Melakukan pendaftaran dan pendataan pedagang, serta penetapan dan penagihan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, karena dari biaya retribusi tersebut, kami bisa melakukan pembangunan pada pasar tersebut. Kami juga melakukan pembinaan penyuluhan pedagang, keamanan dan ketetapan pedagang, dan juga melakukan penataan pedagang. Itu semua bentuk nyata kami sebagai dinas terkait dalam pengembangan pasar Langowan, kalau masih di dapati di lapangan ada kesalahan kecil, kami juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar supaya pengembangan pasar tradisional ini bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan tujuan yang di inginkan. Itu semua merupakan tugas dari pemerintah yang ada, guna bisa mengembangkan pasar tradisional ini. Namun sampai saat ini, belum terlaksana dengan baik, padahal hal tersebut sangat di harapkan oleh masyarakat, baik pengunjung maupun para pedagang, jika tugas dan tanggung jawab pemerintah itu bisa berjalan dengan, pasar Tradisional ini bisa berkembang dengan baik dan setiap masalah dan keluhan yang ada, bisa di atasi. Dan tentunya pasar ini bisa menjadi tempat yang nyaman dan tentunya bisa menguntungkan semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat dan pedagang.
3. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani. Hal ini adalah indikator terpenting dalam mensukseskan pengembangan pasar tradisional, yang dimana pemerintah yang ada dituntut agar supaya cepat merespon setiap permasalahan yang ada dalam pengembangan pasar tradisional ini. Salah satu hal yang harus di perhatikan oleh pemerintah yaitu harus memperhatikan dan menjalankan setiap program yang telah di rencanakan untuk bisa mengembangkan pasar tradisional Langowan. Artinya begitu banyak program dan inovasi yang telah di atur namun belum semua di eksekusi. Seperti program pembinaan kepada setiap pedagang yang tujuan untuk bisa mengelola pasar ini dengan baik, namun belum bisa dilaksanakan oleh pemerintah, hal ini membawah dampak yang buruk dan mengakibatkan pasar ini tidak bisa berkembang dengan baik. Hal seperti ini seharusnya menjadi perhatian yang khusus bagi pemerintah terutama dinas terkait. Adapun hal yang belum bisa di respon cepat oleh pemerintah, yaitu mengenai sarana dan prasarana yang

kurang, yang menjadi keluhan masyarakat dan pedagang, karena hal ini yang menjadi masalah utama pada pasar Langowan, dimana kurangnya fasilitas untuk berdagang sehingga banyak pedagang liar dan tidak dapat di atur dengan baik oleh pengelola pasar Langowan. Belum lagi masalah kebersihan pasar ini, yang jika di biarkan, akan berdampak pada kesehatan masyarakat, dan tentunya mengganggu kenyamanan bagi para pengunjung pasar Langowan. Seharusnya masalah-masalah umum seperti ini bisa di atasi oleh pemerintah yang ada, namun karena respon pemerintah yang lambat sehingga masalah seperti ini tidak bisa terjawabkan dengan baik.

4. *Consensus of orientation.* Dimana pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Jika dilihat dari pengembangan pasar tradisional Langowan, pemerintah tentunya harus melakukan pengembangan pada pasar ini, karena kegiatan ekonomi masyarakat Langowan berada pada pasar ini, jika pemerintah tidak melakukan pengembangan pada pasar ini, artinya pemerintah tidak mengutamakan kepentingan masyarakat yang bergantung hidup di pasar ini. Karena pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli barang bagi masyarakat, dan pasar juga merupakan salah satu cerminan perekonomian dan sosial budaya setiap komunitas masyarakat yang ada. Seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu pasar mengalami evolusi bentuk tempat dan juga cara pengelolaannya, dari yang bersifat tradisional sampai modern. Perkembangan pasar di dunia saat ini mulai mengalami perubahan, dari pasar tradisional menjadi pasar - pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta di tandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biasanya terjadi proses tawar menawar. Pasar tradisional identik dengan toko klontong, kios-kios, dan juga pedagang eceran kebutuhan pokok seperti bahan makanan, buah, sayur-sayuran telur, daging dan juga pakaian. Pasar tradisional di seluruh indonesia secara bertahap menghadapi serangan dari pasar modern. Keberadaan pasar tradisional di era modern masih di butuhkan, karena sebagian besar masyarakat indonesia masih banyak yang belum memahami manfaat dari perkembangan ilmu dan teknologi. Misalnya berbelanja melalui internet. Sampai saat ini pasar tradisional masih dominan dan di butuhkan keberadaannya untuk masyarakat menengah ke bawah. Mengapa demikian karena pembeli selalu menginginkan barang- barang yang berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Itulah peran pasar tradisional yang masih bisa menggunakan sistem tawar-menawar. Namun masalah yang terjadi sekarang pasar tradisional mulai tergeser oleh maraknya pembangunan pasar-pasar modern seperti mini market, hypermarket bahkan supermarket yang sarana dan prasarannya jauh lebih baik dari pada pasar tradisional. Dengan adanya keberadaan pasar-pasar modern seperti mini market, hypermarket bahkan supermarket mengakibatkan daya tarik masyarakat berkurang untuk berbelanja di pasar tradisional. Hal ini dikarenakan pasar tradisional kebanyakan terkesan : pertama, pasar tradisional tidak jarang berlokasi kumuh, bau, kotor, semprawut, sehingga membuat ketidaknyamanan, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan jual beli. Kedua, pedagang pasar tradisional membeli barang lebih mahal di bandingkan dengan pengusaha ritel modern. Hal ini menyebabkan pedagang pasar tradisional menjual barang dagangannya lebih mahal. Ketiga, keterbatasan stok barang membuat pedagang pasar tradisional kalah saing dengan pasar-pasar modern seperti mini market, hypermarket bahkan supermarket yang mempunyai modal lebih besar dan menyediakan stok barang yang banyak, bahkan bisa untuk tiga bulan kedepan. Tiga hal itu turut menjadi jurang pembeda dari pedagang pasar tradisional dengan ritel modern, dan juga kita bisa lihat dan perhatikan pasar tradisional yang ada itu sering kali dalam kondisi kurang higienis dan kurang nyaman. Masyarakat saat ini berbelanja kebanyakan lebih mengedepankan kebersihan dan kenyamanan saat berbelanja. Dari masalah - masalah tersebut, sebenarnya harus menjadi perhatian khusus untuk pemerintah agar bisa mengembangkan pasar tradisional, karena itu merupakan bukti nyata bahwa masyarakat masih membutuhkan pasar tradisional yang ada. Dari hal tersebut, ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengembangan, agar supaya pasar tradisional masih bisa bertahan dan bisa bersaing dengan pasar-pasar modern.
5. *Accountability.* Merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan strategi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan. Pasar tradisional merupakan tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk bisa di

kembangkan, karena pasar tradisional sekarang bersaing dengan pasar modern. Tentunya dalam pengembangan pasar tradisional ini membutuhkan strategi yang jelas dan tepat dari pemerintah sendiri guna bisa menjawab setiap permasalahan yang ada dalam pengembangan pasar tradisional. Sampai saat ini bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pengembangan pasar tradisional masih di anggap kurang peduli, buktinya saja masih ada permasalahan yang di dapati pada pasar tradisional ini. Padahal masalah tersebut bisa selesai dan terjawabkan dengan baik, ketika pemerintah dapat menjalankan program kerja yang telah disusun dengan baik. Seperti program pembinaan para pedagang, melaksanakan pembangunan dan pengembangan pada pasar, melakukan monitoring, dan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi pasar tradisional ini. Karena ketika pasar tradisional tidak bisa di kembangkan dengan baik, maka akan terjadi persaingan dengan pasar – pasar modern, dan ketika pasar modern lebih di minati oleh masyarakat, tentunya akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Karena pasar modern banyak di kelola oleh para pengusaha yang aslinya bukan masyarakat asli pribumi. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus untuk pemerintah agar dapat mengembangkan pasar tradisional ini, karena banyak masyarakat asli pribumi yang bergantung hidup pada pasar – pasar tradisional. Tentunya juga, jika pemerintah tidak melakukan pengembangan pada pasar tradisional ini, maka pemerintah dinilai gagal dalam mengutamakan kepentingan rakyatnya. Solusi yang terpenting dalam pengembangan pasar ini, yaitu pemerintah harus mempunyai strategi yang jelas dan baik, agar supaya setiap permasalahan yang ada, bisa terselesaikan dengan baik. Karena hal yang paling di takutkan ketika pemerintah tidak mengembangkan pasar tradisional ini, maka pasar modern akan lebih di minati oleh masyarakat dan resiko yang paling buruk, yaitu pasar tradisional akan hilang karena tidak mampu bersaing dengan pasar modern.

PENUTUP

Peran pemerintah dalam pengembangan pasar tradisional Langowan masih terkendala karena belum terciptanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Akibatnya, menyebabkan partisipasi masyarakat tidak tercipta. Terkait hal transparansi yang dibutuhkan yaitu untuk bisa mengetahui hal apa saja yang menjadi tugas pemerintah dalam pengembangan pasar tradisional Langowan ini, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Sesuai hasil penelitian yang di dapati bahwa pemerintah harus melakukan penyusunan program kegiatan di bidang pasar tujuannya untuk mengetahui secara rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar tujuan, kewajiban, dan sasaran pengembangan pekerjaan yang di capai. namun nyatanya program yang telah di susun oleh pemerintah hanya sebatas program saja dan tidak berjalan dengan baik, buktinya saja bahwa pemerintah akan memberikan fasilitas bagi para pedagang yang ada, namun ternyata masih banyak pedagang yang tidak mendapat tempat untuk berjualan sehingga di Pasar Langowan ini banyak pedagang liar yang sudah memakai jalan untuk para pengunjung. Pasar tradisional merupakan tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk bisa di kembangkan, karena pasar tradisional sekarang bersaing dengan pasar modern. Tentunya dalam pengembangan pasar tradisional ini membutuhkan strategi yang jelas dan tepat dari pemerintah sendiri guna bisa menjawab setiap permasalahan yang ada dalam pengembangan pasar tradisional. Sampai saat ini bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pengembangan pasar tradisional masih di anggap kurang peduli, buktinya saja masih ada permasalahan yang di dapati pada pasar tradisional ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adri Poesoro. 2007. Pasar Tradisional Di Era Persaingan Global. Lembaga Penelitian SMERU. Jakarta.
- Ansel M Straus dan Juliet Corbin, 2013, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Majid. (2014). Pembelajaran Tematik Terpadu. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bungin, Burhan. 2013. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Prenada Media Group.

- Davey, K.J, 1998 Pembiayaan Pemerintah Daerah–Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga, Penerjemah Amanullah dkk, UI Press, Jakarta.
- Jean Jacques Rousseau. 2010. Kontrak Sosial, terj. Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen, Jakarta : Dian Rakyat.
- Labolo, muhadam. 2011. Memahami ilmu pemerintahan. Rajagrafindo : Jakarta.
- Suhardono, Edy. 1994. Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ndraha, Taliziduhu. 2007. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Penerbit Yayasan Karya.
- Rasyid, Harun dan Mansur. 2008. Penilaian Hasil Belajar. Bandung : CV Wacana Prima.
- Sastradipoera, Komaruddin, (2002). Menejemen Sumber Daya Manusia, Suatu Pendekatan Fungsi Operatif. Bandung : Kappa Sigma.
- Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, Edy. 1994. Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi.